BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi merupakan data yang telah diolah sedemikian rupa, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan. Informasi memegang peran yang sangat penting untuk mengetahui kegiatan apa yang telah terjadi, melakukan evaluasi apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjamin agar data tersebut dapat diolah secara efisien menjadi informasi yang akurat, dapat dipercaya dan tepat waktu maka dalam pengolahan data tersebut diperlukan suatu alat yang dinamakan sistem informasi. Tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi adalah sama dengan tujuan penyusunan sistem akuntansi antara lain (Purnama, 2010):

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasi.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern.
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Tujuan di atas dapat dijelaskan bahwa pengambil keputusan sangat memerlukan adanya sistem informasi akuntansi yang lengkap dan baik. Namun, adakalanya sistem informasi akuntansi yang sudah ada tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Dengan memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengendalian intern, maka pertanggungjawaban melalui laporan keuangan dapat dilaksanakan dengan baik serta informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat digunakan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam penelitiannya (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010) mengatakan Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan dipercaya kebenarannya oleh para pemakai. Nilai informasi yang diharapkan atas pelaporan keuangan pemerintah tentu saja harus bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara salah satunya dengan tata kelola serta aturan yang bisa menjamin kualitas laporan keuangan.

Informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan harus bisa memberikan nilai manfaat atau berkualitas bagi penggunanya. Pemerintah sendiri sejak tahun 2003 telah menetapkan undang-undang yang membahas tentang Keuangan Negara yang meliputi yaitu UU Nomor 17 tahun 2003, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Bentuk pertanggungjawaban keuangan Negara baik pusat maupun daerah adalah dengan

menyajikan laporan keuangan (Silviana, 2013). Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pihak tersebut antara lain masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas dan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah (PP 71 tahun 2010).

Informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah yang disampaikan melalui laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika informasi tersebut mempunyai kualitas yang baik. Informasi yang berkualitas menurut PP No. 71 Tahun 2010 terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Hal ini sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang tertuang pada Undang-undang No. 32 tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya aturan yang membahas tentang otonomi daerah dan pelaporan keuangan tersebut diharapkan bahwa baik pemerintah ataupun pemerintahan daerah dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Didalam UU No 32 Tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada Pasal 21 Dalam menyelenggarakan otonomi, salah satunya daerah mempunyai hak untuk mengurus pajak daerah sebagai salah satu sumber dari pendapatan asli daerah. Pajak daerah

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah. Dalam BAB II Pasal 2 ayat (1) UU No. 28/2009 dinyatakan bahwa jenis pajak Provinsi terdiri atas :

1. Pajak kendaraan bermotor,
2. Bea balik nama kendaraan bermotor,
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
4. Pajak air permukaan,
5. Pajak rokok.

Pajak provinsi merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat diandalkan. Seperti 7 provinsi yang di ambil sample sebagai provinsi yang Pendapatan Asli Daerahnya terbesar dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu: Pemerintah DKI Jakarta 2012 mengtargetkan PAD dari PKB sebesar Rp15.625 triliyun dan dari BBKB sebesar Rp 430,870 miliar, Povinsi Jawa Timur Tahun 2012 dari sektor PKB dan BBNKB meproyeksikan sebesar Rp 6,311 triliun, Untuk jawa Tengah, pemerintahnya mentargetkan lebih dari rp 3 triliun dari penerimaan PKB dan BBNKB, Provinsi Sumut, mentargetkan Rp1,7 triliun dari PKB dan BBNKB, sedangkan dari BBKB sebesar Rp 650 miliyar, Provinsi Jabar mentargetkan PAD-nya dari sektor ini sebesar Rp 7,5 triliun., pemerintah Sumsel mentargetkan dari

PKB dan BBNKB sebesar Rp1.321.016.700.000 dan yang terakhir Provinsi Lampung mentargetkan Rp 2,8 triliyun (dari berbagai sumber) (kompas, 2012).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki PAD yang cukup besar tiap tahun nya. Tercatat pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014 sebesar Rp 22,44 truliun lebih, yang jumlah nya melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 21,29 triliun, atau lebih besar 105,40%. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar tiap tahunnya bagi Jawa Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, menghimbau kepada Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat agar mengupayakan penigkatan pengahasilan dari sektor pajak untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Jawa Barat. Pajak di Jawa Barat saat ini masih disumbangkan terbesar oleh pajak kendaraan bermotor, persentasenya sendiri ada sekitar 80 persen. Ini cukup menyumbangkan pendapatan yang besar bagi PAD Jawa Barat (pusdalisbang.jabarprov, 2014).

Pada tahun 2015 ini, walaupun masih pada periode triwulan I tercatat pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meraup pendapatan daerah secara keseluruhan sebesar Rp 8,75 triliun. Berdasarkan pendaptan daerah yang baru di dapat tadi, PAD terbesar masih disumbang dari pendapatan pajak daerah yang bersumber pada pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Gambar 1

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat

Triwulan 1 Tahun 2015

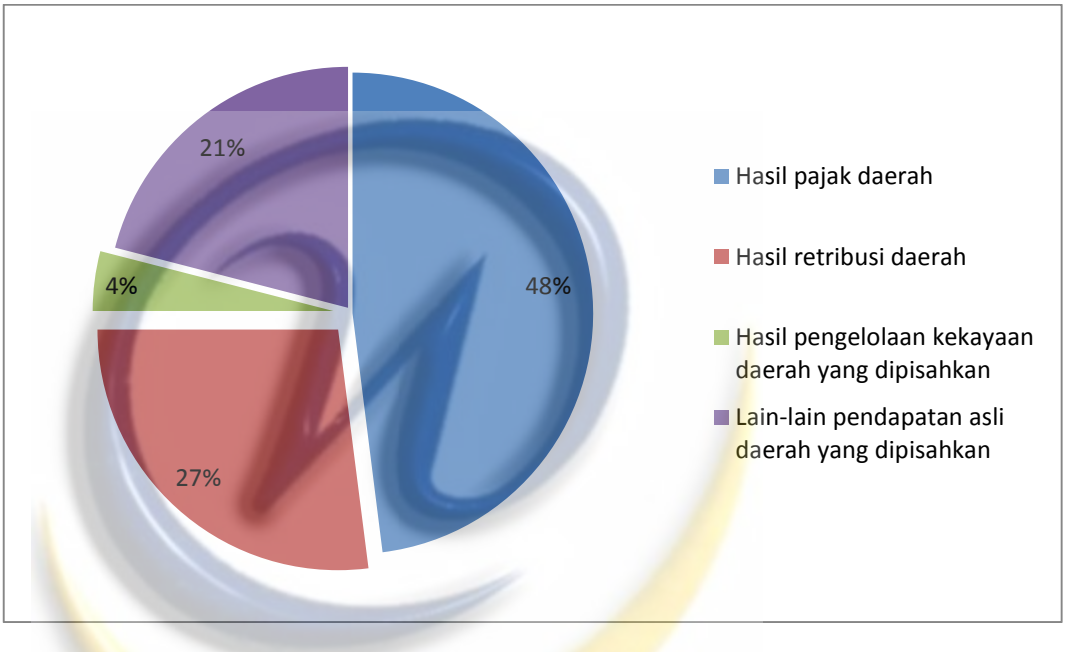

Sumber : www.republika.co.id

Pada diagram lingkaran tersebut menunjukan bahwa yang mendominasi pendapatan daerah Jawa Barat pada triwulan 1 tahun 2015 ini, masih bersumber dari hasil pajak daerah. Walaupun terhitung sampai triwulan 1, hasil pajak daerah sudah menjadi sumber terbesar PAD Jawa Barat yakni sebesar 48%, selanjutnya di ikuti hasil retribusi daerah sebesar 27% lalu ada hasil dari lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan sebesar 21% dan terakhir dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4% (Republika,2015).

Walaupun pajak daerah ini menjadi sumber terbesar pendapatan asli daerah masih terdapat penggelapan pajak yang terjadi yang berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah bahkan negara ikut merasakan kerugian, seperti yang terjadi di Sumatera Selatan. Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Sumatera Selatan, Eppy Mirza, menyatakan siap untuk diperiksa pihak Polda Sumsel terkait kasus dugaan penggelapan dana pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPTD Samsat 1 Palembang yang diduga merugikan negara hingga Rp 64 milyar (antarasumsel, 2014). Tidak hanya di Sumatra Selatan, kasus serupa terjadi di Kantor Samsat Kabupaten Lebak, 3 tersangka melakukan penggelapan uang pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBNKB), dengan kerugian mencapai Rp1,6 miliar (beritasatu, 2012). Provinsi Jawa Barat pun menjadi salah satu provinsi yang terus mengusut penggelapan pajak yaitu penggelapan pajak air yang sengaja dilakukan oleh industri-idustri terutama oleh industry textile (inilahkoran, 2015).

Melihat fenomena ini, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu SKPD di Jawa Barat yang bertugas mengelola pajak provinsi, merupakan salah satu titik kebenaran dan keterandalan laporan keuangan Provinsi Jawa Barat. Mengelola transaksi pajak yang memiliki volume besar membutuhkan sistem yang teerintegrasi untuk membantu pelaporan keuangan tersebut (godamorganisasi, 2013). Keunggulan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sendiri telah berinovasi untuk memperlancar pelaporan keuangan yaitu Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Barat telah bekerja sama dengan Bank BJB menggagas kemudahan pelayanan pajak daerah tersebut dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti sms *banking*, *e-banking*, dan aplikasi khusus di ponsel. Kerja sama itu menjadi bagian dari transformasi struktural yang dilakukan guna menciptakan kinerja yang akuntabel dan juga meninngkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah (Sjo, 2014). Selain itu, pada awal tahun 2010 Dinas pendapatan mengadakan *Launching* Samsat Online Jabar sebagai bentuk penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar pencatatan transaksi agar lebih cepat sehingga bisa memperlancar pelaporan keuangan dan mengurangi risiko penggelapan pajak (Martiana, 2010). Berkaitan dengan kebutuhan sistem yang baik dalam pengelolaan keuangan, pemerintah sendiri telah mengeluarkan aturan kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 yang telah berubah menjadi Peraturan Pemerinntah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah tentang Informasi Keuangan Daerah (Desmiyaawati, 2014).

Menurut (Soverchia, 2015), Pada awal 2000-an fenomena yang meledak yaitu menyangkut penggunaan teknologi baru ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi), sejumlah penelitian mengatakan pemerintah yang sedang berlangsung, menunjukkan bahwa pemerintah berminat atas potensi yang ditawarkan oleh penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

publik dan mengelola hubungan dengan berbagai jenis entitas pemangku kepentingan publik, seperti warga negara, perusahaan dan badan-badan publik lainnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi informasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap.

Merujuk pada fenomena yang mengatakan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki pendapatan yang besar dari pajak daerah diharapkan akan adanya informasi pendapatan yang berkualitas yang di keluarkan Dispenda Jabar. Maka berdasarkan pada Peraturan Pemerinntah No. 65 Tahun 2010 tentang kewajiban pemanfaatan teknologi informasi di bidang keuangan dan penerapan Sistem Informasi Akuntansi mengacu pada PP No.58 Tahun 2005, dengan diterapkannya Sistem Informasi Akuntansi diharapkan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah dapat tercapai sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan pada akhirnya dapat mengalokasikan dana yang tersedia untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Penelitian ini merujuk pada peneletian sebelumnya yang dilakukan oleh (Silviana, 2013) tentang “Hubungan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah” yang menyatakan

bahwa belum maksimalnya kontribusi sistem informasi akuntansi dalam menjelaskan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranta disebabkan oleh: masih ada yang terlambat menyerahkan laporan keuangan sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang masih belum memadai. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Diani, 2014) tentang "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah" menjelaskan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terutama mengenai bagaimana pengaruhnya dalam pelaporan realisasi anggaran pendapatan dari sektor pajak daerah provinsi Jawa Barat dan bermaksud menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul:

"Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan" . (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah :

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimanakan kualitas informasi tentang pendapatan daerah dari sektor pajak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat ?
3. Seberapa besar pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas informasi pelaporan realisasi anggaran pendapatan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, data dan informasi mengenai pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tujuan dari penelitian ini, untuk mendaptkan bukti empiris mengenai:

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi yang di jalankan di Dispenda Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui dan mendapatakan bukti pengaruh signifikan antara penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas informasi pelaporan realisasi anggaran pendapatan di Dispenda Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Penulis

   Dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan realisasi anggaran pendapatan di Dispenda Jawa Barat.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai penerapan praktik Sistem informasi Akuntansi, terutama dalam sistem pencatatannya sehingga dapat menghasilkan laporan realisasi pendapatan yang informasi nya berkualitas agar bisa dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan

3. Bagi Masyarakat

   Dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dalam sektor publik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun waktu yang di tentukan yakni bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2015.